

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Ekonomi merupakan bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia (Iskandar, 2010). Dalam konteks yang lebih luas, kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari perorangan hingga negara sebagai satu kesatuan yang saling terhubung (Gilarso, 2004). Ketahanan ekonomi individu dan masyarakat menjadi indikator kesejahteraan yang krusial, dimana negara perlu menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut.

Sektor pariwisata, sebagai salah satu penggerak utama perekonomian, memiliki peran strategis. Menurut Suwanto (2004), pariwisata adalah proses kepergian sementara seseorang atau kelompok ke tempat di luar domisilinya dengan berbagai motivasi, seperti ekonomi, sosial, budaya, atau sekadar rekreasi. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman bagi wisatawan tetapi juga mendatangkan pendapatan bagi daerah tujuan melalui berbagai transaksi ekonomi.

Sebagai destinasi pariwisata global, Provinsi Bali menggantungkan perekonomiannya pada sektor pariwisata. Kabupaten Gianyar, khususnya, dikenal dengan kekayaan budaya dan spiritualnya, yang diwujudkan dalam objek wisata seperti Pura Tirta Empul di Desa Manukaya, Tampaksiring. Pura ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat suci untuk ritual melukat (penyucian diri) tetapi juga sebagai magnet pariwisata yang signifikan. Namun, geliat pariwisata di kawasan ini mengalami pukulan berat akibat pandemi COVID-19.

Data dari Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan dampak serius pandemi, dengan angka positif COVID-19 di Bali

mencapai 155.490 per 18 Maret 2022. Imbasnya, kunjungan wisatawan ke Bali merosot drastis. Tabel di bawah mengilustrasikan penurunan tersebut:

**Table 1 Jumlah Tahunan Angka Turis Di Provinsi Bali**

No.	Tahun	Angka Turis
1.	2018	9.757.991
2.	2019	10.545.039
3.	2020	4.301.592
4.	2021	3.301.520

Sumber: Website Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Berdasarkan data dari Balitribunnews, Kabupaten Gianyar juga mengalami penurunan pengunjung yang signifikan. Dari 162 ribu pengunjung pada Februari 2019, angka turun drastis menjadi 92 ribu pada Februari 2020 dan terus menurun. Kondisi ini mengancam ketahanan ekonomi masyarakat lokal yang mata pencahariannya bergantung pada pariwisata, seperti pelaku usaha penyewaan pakaian adat, penjual sarana persembahyangan, restoran, dan penginapan di sekitar Pura Tirta Empul.

Dalam upaya pemulihan, pendekatan Community-Based Tourism (CBT) yang dikemukakan oleh Baskoro (2008) menjadi relevan. CBT menekankan pemberdayaan masyarakat untuk memahami dan mengelola aset lokal (seperti adat istiadat, budaya, dan kuliner) sebagai daya tarik wisata. Konsep ini sejalan dengan karakteristik Bali yang kaya akan kearifan lokal. Implementasi CBT di tempat lain, seperti di Mae Kam Pong, Chiang Mai, Thailand, menunjukkan keberhasilan dalam membangun pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Namun, pemulihan ekonomi pariwisata di Bali, khususnya di kawasan Pura Tirta Empul, menghadapi kompleksitas tata kelola yang unik. Daerah ini menerapkan sistem dual leadership, yaitu antara pemerintah formal (Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar) dan pemerintah tradisional (Desa Adat Manukaya). Keberhasilan pemulihan tidak hanya bergantung pada kebijakan top-down dari pemerintah daerah, tetapi juga

pada efektivitas kolaborasi dengan Desa Adat yang memegang kendali penuh atas pengelolaan kawasan pura dan tata cara ritual.

Berdasarkan "Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru" dari Bappenas (2021), salah satu strategi pemulihan adalah mendorong pemulihan kegiatan usaha melalui bantuan likuiditas bagi pelaku usaha dan pengembangan kapasitas pekerja di sektor UMKM. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan dari arus bawah (masyarakat) yang diintegrasikan dengan kebijakan makro pemerintah.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada Tata Kelola Kolaboratif antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dan Desa Adat Manukaya dalam Pemulihan Ekonomi Pariwisata di Kawasan Pura Tirta Empul. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, implementasi, serta faktor pendukung dan penghambat kolaborasi tersebut, yang menjadi domain kajian penting dalam Ilmu Pemerintahan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana bentuk tata kelola kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Desa Adat Manukaya dalam pengelolaan kawasan wisata Tirta Empul pasca pandemi COVID-19?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam tata kelola pariwisata di Kawasan Tirta Empul?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan bentuk tata kelola kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Desa Adat Manukaya di Kawasan Tirta Empul pasca pandemi.

2. Menganalisis implementasi kebijakan pemulihan ekonomi berbasis kearifan lokal di Kawasan Tirta Empul.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi tersebut.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam beberapa aspek secara teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam teori Collaborative Governance dan Multi-Level Governance dalam konteks pemulihan pasca-krisis di daerah dengan dualisme kepemimpinan.
- b. Memperkaya khazanah akademik mengenai penerapan Community-Based Tourism (CBT) dan pendekatan berbasis kearifan lokal (Local Wisdom) dalam tata kelola pariwisata.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Desa Adat Manukaya dalam memperkuat dan menyempurnakan kolaborasi untuk pemulihan ekonomi pariwisata yang berkelanjutan.
- b. Dapat dijadikan sebagai studi pembandingan (best practice atau lesson learned) bagi pemerintah daerah lain yang menghadapi situasi serupa, khususnya di daerah dengan karakteristik adat yang kuat.

### 1.3 Definisi Konseptual

#### 1.3.1 Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance)

Tata kelola kolaboratif merujuk pada suatu pengaturan di mana berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor (pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat) terlibat dalam proses kolektif untuk membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Dalam konteks penelitian ini, tata kelola kolaboratif didefinisikan sebagai kerjasama sinergis antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar (aktor formal) dan Desa Adat Manukaya (aktor tradisional) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemulihan ekonomi pariwisata di Kawasan Tirta Empul pasca pandemi COVID-19. Konsep ini menekankan pada pembagian peran, komunikasi, dan koordinasi antar pihak untuk mencapai tujuan bersama.

#### 1.3.2 Local Wisdom

Kearifan lokal bila dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). *Local* berarti setempat dan *wisdom* sama dengan kebijaksanaan. Maka kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan pandangan lingkungan sekitar yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai positif, yang tertanam dan diikuti oleh setiap elemen masyarakatnya Nadlir, (2014: 305-330).

Adapun karakteristik kearifan lokal, yaitu (1) harus menggabungkan pengetahuan kebajikan yang dimana mengajarkan individu tentang sebuah etika dan nilai-nilai moral; (2) kearifan lokal harus memberikan pemahaman kepada manusia untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya; dan (3) kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua, Mungmachon, (2012:174). Kearifan lokal bisa berwujud berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum, adat, aturan-aturan khusus. Semua hal tersebut yang dimana akan dibawa untuk hal-hal kebaikan dari masyarakat

lingkungan tersebut maupun daerah lainnya yang mengerti nilai-nilai kebaikannya.

Suansari (2003:21-22) mengungkapkan beberapa point-point aspek utama model *Local Wisdom* terdapat dimensi, yaitu:

1. Dimensi ekonomi, dengan indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata.

2. Dimensi sosial dengan indikator meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki perempuan, generasi muda dan tua, membangun penguatan organisasi komunitas.

3. Dimensi budaya dengan indikator berupa mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam budaya lokal.

4. Dimensi lingkungan, dengan indikator mempelajari carrying capacity area, mengatur pembuangan sampah, meningkatkan kepedulian akan perlunya konservasi.

### **1.3.3 Pemulihan Ekonomi Pariwisata**

Pemulihan ekonomi pariwisata didefinisikan sebagai serangkaian upaya sistematis untuk mengembalikan dan meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata yang terdampak krisis (dalam hal ini pandemi COVID-19). Indikator pemulihan meliputi:

1. Peningkatan kunjungan wisatawan.
2. Kebangkitan usaha-usaha pariwisata (seperti penyewaan pakaian adat, akomodasi, kuliner).
3. Peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

#### 4. Penciptaan lapangan kerja baru di sektor terkait

##### **1.3.4 COVID-19 dan Ekonomi Indonesia**

Sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya menyatakan wabah COVID-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020, kehidupan semakin meningkat dan aktivitas ekonomi di seluruh dunia terganggu. Per 9 April 2020, wabah COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei, China, telah mencapai 203 negara, mempengaruhi 1.476.819 orang, dengan 87.816 kematian (84.477 di antaranya di luar China). Di ASEAN, jumlahnya juga meningkat, dengan lebih dari 15.532 kasus dikonfirmasi dan lebih dari 529 kematian dilaporkan pada 9 April (APB, 2020).

COVID-19 berdampak parah dan meluas terutama di Indonesia. COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada 03 Maret 2020 kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh 34 provinsi pada 09 April 2020. Sejak itu, COVID-19 dinyatakan sebagai keadaan darurat bencana dan kesehatan nasional. Terdapat perbedaan yang signifikan antara ritel, toko bahan makanan dan apotek, serta mobilitas penduduk sebelum dan selama pandemi COVID-19 di Indonesia dan merupakan kerugian ekonomi yang parah, industri, perusahaan, dan gangguan nyata yang parah untuk semua tingkat kehidupan karena pembatasan skala besar (Caraka dkk, 2020).

Pulau Bali sebagai salah satu pusat pariwisata di Indonesia telah merasakan dampak Covid 19 yang sangat besar. Perekonomian Bali yang bertumpu pada pariwisata dengan keindahan alam dan budayanya mengalami penurunan yang sangat drastis. Data menunjukkan, jumlah wisman ke Bali pada Januari 2021 mengalami penurunan sebanyak 93,33%, dibanding rekor Desember 2020 dan jika dibandingkan Januari 2020, jumlah wisman ke Bali tercatat mengalami penurunan hampir 100 % yaitu -99,998% (BPS, 2021).

Sebagai negara terbuka, perekonomian Indonesia tidak kebal terhadap gejolak dunia yang dikarenakan oleh pandemi COVID-19. Berbagai badan

ekonomi internasional seperti Bank Dunia memperkirakan pandemi tersebut akan mengikis pertumbuhan ekonomi nasional hingga hanya berada pada level -3,5% sampai dengan 2,1% pada 2020. Sesuai dengan Bank Dunia, IMF juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.5% pada 2020. Hal itu jelas merupakan sebuah koreksi tajam dari tingkat pertumbuhan sebesar 5,02% yang tercatat pada tahun 2019. Sementara dari sisi sosial ekonomi, beberapa lembaga memperkirakan akan terjadi tambahan antara 1,16 juta (+0.44%) hingga 9,6 juta (+3.6%) penduduk miskin pada 2020, yang tergantung pada derajat kerusakan pada ranah ekonomi yang akan terjadi. Begitu juga, jumlah penganggur diperkirakan akan bertambah sebesar 2,91 juta (2.17% angkatan kerja) hingga 5,23 juta (3.79% angkatan kerja) pada 2020.

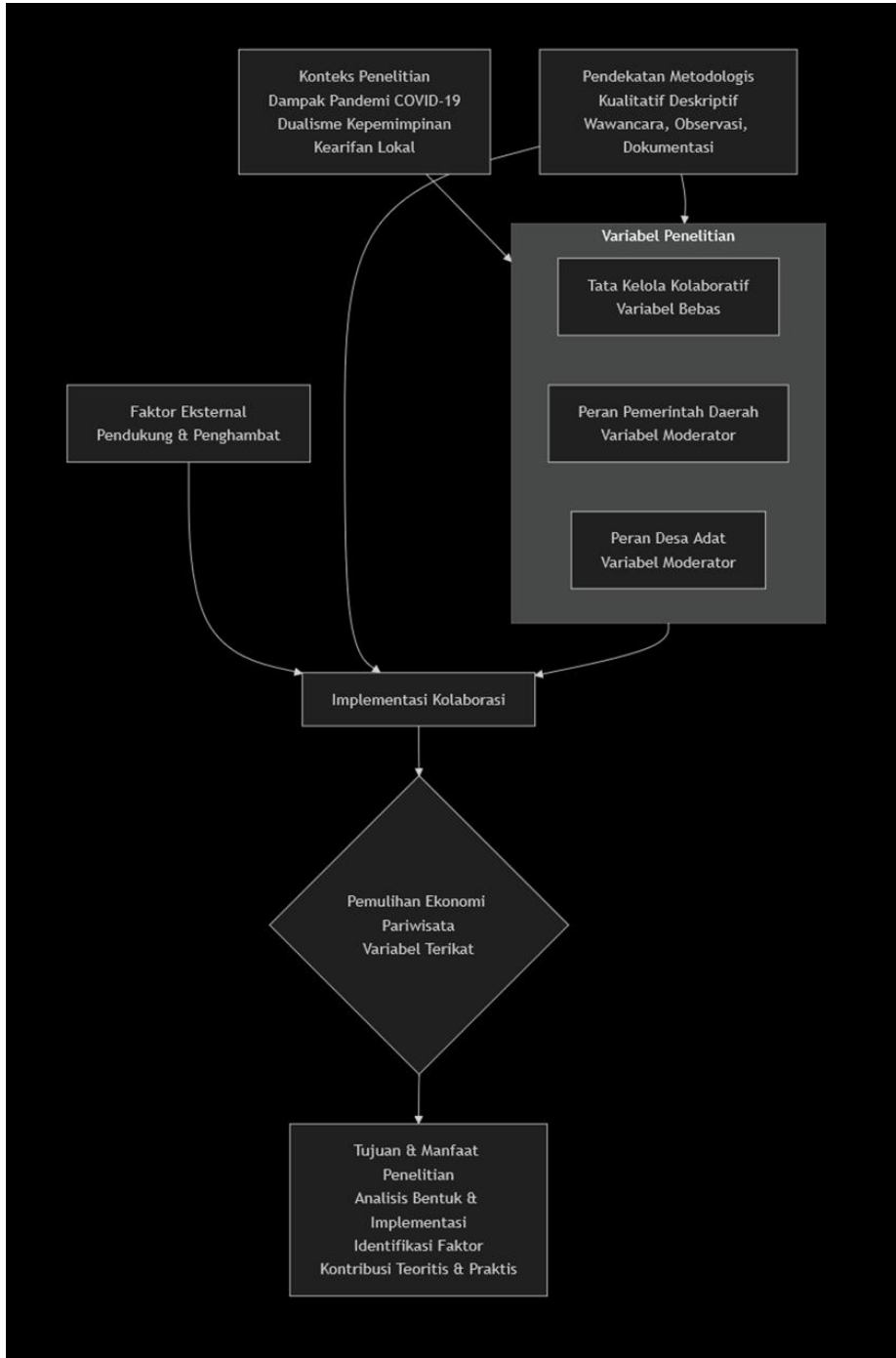
### **1.3.5 Pemerintah Daerah**

Dalam penelitian ini, Pemerintah Daerah mengacu pada Pemerintah Kabupaten Gianyar, khususnya Dinas Pariwisata dan dinas terkait lainnya, yang memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pemasaran pariwisata di tingkat kabupaten. Peran mereka termasuk menyusun kebijakan, memberikan bantuan stimulus, dan memfasilitasi pemulihan sektor pariwisata.

### **1.3.6 Desa Adat**

Desa Adat merujuk pada Desa Adat Manukaya sebagai entitas sosial-budaya yang memiliki kewenangan tradisional dalam mengelola kawasan Pura Tirta Empul. Desa Adat memegang peran vital dalam mengatur tata cara ritual, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat adat setempat. Keterlibatan Desa Adat sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemulihan pariwisata yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal.

## Framework



Gambar 1 Framework

Penelitian ini berangkat dari konteks spesifik, yaitu dampak pandemi COVID-19 yang melumpuhkan sektor pariwisata Bali, situasi dualisme kepemimpinan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dan Desa Adat Manukaya, serta kekayaan kearifan lokal yang melekat pada kawasan Pura Tirta Empul. Konteks inilah yang melatarbelakangi perlunya mengkaji **tata kelola kolaboratif** sebagai variabel bebas, yang dihipotesiskan dapat mendorong pemulihan ekonomi. Hubungan antara kolaborasi dan pemulihan ini tidak berlangsung secara langsung, tetapi dimoderasi oleh **peran masing-masing aktor** yaitu peran formal Pemerintah Daerah dalam hal kebijakan dan stimulus, serta peran tradisional Desa Adat dalam pengelolaan berbasis kearifan lokal. Interaksi dan sinergi antara kedua aktor inilah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk **implementasi kolaborasi**, yang mencakup perencanaan bersama, pelaksanaan program, dan evaluasi.

Proses implementasi ini tidak berjalan dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal, baik yang bersifat pendukung seperti komunikasi yang intens dan harmonisasi regulasi, maupun penghambat seperti keterbatasan sumber daya dan potensi konflik kepentingan. Keberhasilan implementasi kolaborasi pada akhirnya bertujuan untuk mencapai pemulihan ekonomi pariwisata sebagai variabel terikat, yang indikatornya mencakup peningkatan kunjungan wisatawan, kebangkitan usaha lokal, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Seluruh alur penelitian ini mulai dari mengidentifikasi bentuk kolaborasi, menganalisis implementasinya, hingga mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dijalankan dengan menggunakan pendekatan metodologis kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual. Pada akhirnya, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam teori *collaborative governance*, maupun secara praktis sebagai bahan evaluasi dan *best practice* bagi pemangku kepentingan di daerah lain dengan karakteristik serupa.

## 1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu pengidentifikasian acuan konsep yang akan didefinisikan dengan menggunakan kondisi, bahan, dan prosedur yang berlaku. Berdasarkan judul penelitian "Tata Kelola Kolaboratif Pemerintah Daerah dan Desa Adat dalam Pemulihan Ekonomi Pariwisata (Studi Kasus di Pura Tirta Empul, Kabupaten Gianyar, Bali)", maka definisi operasional variabel penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Tata Kelola Kolaboratif: Pemerintah Daerah dan Desa Adat
  - 1.1 Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator dan Fasilitator
  - 1.2 Otoritas dan Legitimasi Desa Adat dalam Implementasi Kebijakan
  - 1.3 Model Kemitraan dan Dinamika Kekuasaan
2. Implementasi Kebijakan: Dinamika dan Tantangan di Lapangan
  - 2.1 Sumber Daya dan Komunikasi
  - 2.2 Karakteristik Agen Implementor
  - 2.3 Lingkungan Sosial-Ekonomi
3. Dampak Tata Kelola Kolaboratif terhadap Pemulihan Ekonomi

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Menurut Creswell, pengaplikasian metode penelitian kualitatif tersebut dimulai dengan asumsi, tafsir atau teoretis dan masalah penelitian yang meneliti cara individu atau kelompok mengartikan permasalahan sosial atau kemanusiaan. Mampu menggambarkan dinamika masalah secara mendalam dan rinci dari masalah yang diangkat dan juga dapat dengan jelas menganalisis dalam bentuk asli dan bukti dengan mengumpulkan, menganalisis dan menampilkan data (Creswell & W, 2015). Studi deskriptif kualitatif itu bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi dan

situasi di lokasi peneliti nanti. Selain itu, ini juga yaitu sebagai prosedur pemecah masalah yang telah dipelajari dengan bergerak, menggambarkan situasi subjek, objek penelitian saat ini didasarkan pada realitas yang terjadi Nawawi, (2003).

### **1.6.2 Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung yang dihasilkan oleh wawancara ke narasumber. Wawancara itu bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dan informasi tambahan dalam pengetahuan tentang keaslian fenomena yang menjadi kajian untuk diteliti. Peneliti akan mengamati dengan cara melakukan wawancara dengan subyek peneliti sehingga data yang didapatkan yaitu objektif. Maka, wawancara yang dilakukan dengan subjek terdapat berbagai hal tentang penelitian ini.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui studi perpustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan undang-undang terkait dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut digunakan untuk mendapatkan landasan dasar teori penelitian dan memperkuat data primer yang telah didapatkan melalui observasi dan wawancara dari narasumber.

### **1.6.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang akan memberikan informasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki informasi mengenai penelitian skripsi tersebut kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Kepala Bagian Pariwisata Provinsi Bali dan pelaku ekonomi. Peneliti dapat menemui dan mewawancarai pihak yang mengerti dan paham mengenai Bagaimana model pengelolaan berbasis *Local Wisdom* sebagai pendukung pemulihan ekonomi

pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Gianyar. Berikut adalah subjek dalam penelitian ini:

1. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali
2. Bendesa Manukaya.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam berbagai metode yaitu melalui wawancara, observasi atau pengamatan dan dokumentasi. Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan yaitu yang dianggap mempunyai informasi (*key-informan*) yang dibutuhkan di wilayah lingkup penelitian. Dalam teknik dan instrumen pengumpulan data, metode yang digunakan dalam penelitian adalah:

##### **a. Wawancara**

Metode tersebut dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian. Wawancara memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi langsung dari responden yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang konkrit, dan peneliti melakukan *semi-structured* dengan subjek penelitian.

##### **b. Observasi**

Peneliti melakukan observasi secara langsung serta menganalisa tentang bagaimana model pengelolaan berbasis *local wisdom* sebagai pendukung pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Gianyar untuk memperoleh data sebagai bahan untuk dianalisa. Dalam observasi tersebut, peneliti akan mengamati bagaimana program dilaksanakan dalam bagaimana model pengelolaan berbasis *local wisdom* sebagai pendukung pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Gianyar

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang tertulis maupun digital. Seperti arsip-arsip atau dokumen dan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan objek penelitian serta objek bergambar. Untuk mendapatkan dokumen-dokumen atau arsip peneliti melakukan kunjungan ke lapangan yaitu ke lingkup Pemerintah Provinsi Bali.

#### 1.6.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, studi kepustakaan atau dokumentasi, dan juga observasi sehingga dapat dipahami secara mudah oleh pembaca. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sehingga dalam analisis tersebut tidak menggunakan model statistika dan model hitungan yang lainnya (Creswell & W, 2015). Dengan demikian peneliti melakukan analisis data sebagai berikut:

- a. Melakukan *literature review* dalam pengumpulan data awal sesuai dengan tema yang diambil.
- b. Peneliti melakukan wawancara dengan objek penelitian yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Kepala Bagian Pariwisata Provinsi Bali, dan, pelaku ekonomi
- c. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, peneliti melakukan pemilahan data yang sesuai dengan pembahasan dan dinamika permasalahan yang telah diuraikan.
- d. Data yang dipilah kemudian disajikan untuk memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan data agar dapat dipahami serta memudahkan pembaca dalam memahami penelitian tersebut.